



## PASCA DEMOKRATISASI TIMUR TENGAH

ADIRINI PUJAYANTI<sup>\*)</sup>

### Abstrak

*Krisis politik Tunisia yang dipicu peristiwa bakar diri Muhammad Bouazizi 17 Desember 2010, menandai dimulainya semangat demokratisasi di Timur Tengah atau dikenal sebagai Arab Spring. Pergolakan politik tersebut berefek domino ke negara-negara Timur Tengah lainnya. Transisi demokrasi di Timur Tengah yang seringkali dibarengi dengan terjadinya kekerasan politik yang memakan korban jiwa selalu menuai kecaman dan tekanan dari dunia internasional. Upaya PBB untuk mengakhiri kekerasan tersebut dengan menjatuhkan sanksi maupun dukungan operasi militer dari NATO terhadap negara bersangkutan tidak selalu berhasil*

### Pendahuluan

Sejak awal tahun 2011, Timur Tengah (dalam arti luas, mencakup juga Afrika Utara) mengalami pergolakan dengan adanya gerakan demonstrasi massa di berbagai negara di kawasan tersebut yang kemudian sering disebut sebagai gelombang demokratisasi Timur Tengah atau *Arab Spring*. Dimulai dengan serangkaian demonstrasi yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Presiden Zine El Abidine Ben Ali, kemudian Mesir (Revolusi Mesir) dengan turunnya Presiden Hosni Mubarak. Meskipun tidak berujung pada penurunan kepala negara, demonstrasi pendukung demokrasi juga terjadi di Bahrain, Arab Saudi, Yordania, Maroko dan Aljazair.

Sementara aksi protes telah melumpuhkan Yaman dan melemahkan kontrol pemerintah atas sejumlah

ne-gara bagian. Demontrasi politik tersebut bertujuan memaksa Presiden Ali Abdullah Saleh untuk meletakkan jabatan yang telah diembannya selama 33 tahun. Pemerintahannya menolak menyerahkan kekuasaannya kepada pihak oposisi, maupun persyaratan masa transisi yang ditawarkan negara-negara Arab. Cabang Al Qaeda di Yaman (AQAP) ditengarai telah mengambil alih wilayah Yaman Selatan, sementara upaya militer memerangi AQAP salah sasaran dan megebom tentara Yaman sendiri.

Konflik politik terjadi di Suriah dimana jatuh banyak korban jiwa karena penggunaan *deadly force* dalam penanganan aksi protes tersebut. Perang saudara antara kelompok oposisi anti Khadafi dan pendukung Khadafi masih terus berlangsung di Libya, yang kemudian berujung pada intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Pakta Pertahanan Utara (NATO)

<sup>\*)</sup> Peneliti Bidang Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: adirini.pujayanti@dpr.go.id

di negara tersebut. PBB menerapkan *no-fly zone* di wilayah Libya yang disusul oleh operasi militer di bawah kendali NATO. Moamar Khadafi dalam pelariannya terus menyerukan agar rakyat Libya melawan penguasa baru di Dewan Transisi Nasional (NTC) yang dianggapnya berkuasa melalui kekerasan senjata secara paksa.

Di tengah semangat demokratisasi di Timur Tengah ini dukungan terhadap kemerdekaan Palestina semakin kuat. Sebaliknya posisi Israel dan AS tersudut, karena rakyat Arab saat ini semakin kritis terhadap pengaruh AS di negaranya. Para pemimpin Arab akan tunduk pada tekanan domestik dan regional untuk menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih bebas dan asertif. Keanggotaan Palestina mendapat dukungan penuh dari negara-negara Arab. Saat ini UNESCO telah memberi sinyal positif untuk keanggotaan Palestina dalam organisasi tersebut. Ini menjadi kemenangan diplomatik pertama bagi Palestina yang berjuang meraih pengakuan dengan status sebagai negara. Dengan menjadi anggota UNESCO memungkinkan Palestina untuk mendaftarkan situs-situs sejarahnya ke PBB sebagai situs warisan dunia. Saat ini banyak situs peninggalan sejarah Palestina berada dalam sengketa.

## **Intervensi PBB dan NATO**

Transisi demokrasi di Timur Tengah yang seringkali dibarengi dengan terjadinya kekerasan politik yang memakan korban jiwa selalu menuai kecaman dan tekanan dari dunia internasional. Upaya PBB untuk mengakhiri kekerasan tersebut dengan menjatuhkan sanksi maupun dukungan operasi militer dari NATO terhadap negara bersangkutan tidak selalu berhasil. Isu Libya dan Afghanistan menjadi rujukan dalam setiap intervensi kemanusiaan di Timur Tengah melalui operasi militer NATO.

NATO telah 10 tahun berperang di Afghanistan dengan tujuan memburu Osama bin Laden, pemimpin Al Qaeda

yang bertanggung jawab atas tragedi 11 September dan meruntuhkan rejim Taliban yang melindungi Osama. Rejim Taliban dapat ditumbangkan dan Osama akhirnya tewas bulan Mei 2011. Namun, perang di Afghanistan tidak kunjung berakhir meski sedikitnya 33.877 orang tewas. AS beranggapan misi mereka belum sepenuhnya berhasil di Afghanistan dan masih menempatkan 140.000 pasukan NATO. Saat ini rakyat Afghanistan memiliki akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Namun, keamanan masih rawan karena perang terus berlangsung dan korupsi dalam pemerintahan Presiden Hamid Karzai yang didukung koalisi Barat. AS dan sekutu mengakui invasi militer ke Afghanistan dilakukan dengan bekal pengetahuan budaya setempat yang minim, akibatnya kehadiran militer AS banyak menimbulkan konflik.

Masalah yang hampir sama terjadi di Libya. Libya merupakan negara kaya migas, namun politik migas Khadafi sangat revolusioner menguntungkan Libya dan sekaligus mengurangi keuntungan Barat. Dalam kasus Libya Resolusi DK PBB yang mengizinkan penggunaan kekuatan militer untuk melindungi warga sipil Libya disalahgunakan NATO untuk melakukan intervensi militer guna menjatuhkan pemimpin Libya Moammar Khadafi. NATO bahkan memutuskan memperpanjang penugasan pasukannya di Libya selama Khadafi belum tertangkap, NATO terus melakukan pengeboman terhadap wilayah pertahanan Khadafi di tanah kelahirannya Sirte. Sejak memutuskan untuk mendukung pihak oposisi, NATO telah melancarkan 9.300 serangan udara terhadap pasukan pendukung Khadafi. Keberadaan Khadafi sendiri belum diketahui, namun ditengarai ia berada di perbatasan Niger. NATO dikritik melangkahi resolusi DK PBB yang menetapkan zona larangan terbang dan perlindungan terhadap warga sipil yang terperangkap dalam peperangan. Warga Sirte terpaksa mengungsi keluar kota untuk menghindari bahaya. Palang Merah Internasional telah mengingatkan akan adanya bencana kemanusiaan di

wilayah kendali pendukung Khadafi karena intensitas pertempuran yang tinggi tersebut. Sementara utusan senior PBB untuk Libya, Ian Martin mendesak perlunya landasan rekonsiliasi nasional untuk mengakhiri masalah ini.

Afghanistan dan Libya menjadi rujukan dalam setiap keputusan intervensi PBB dan pengerahan pasukan NATO di Timur Tengah pasca *Arab Spring*. Dalam kasus Suriah PBB memperkirakan jumlah korban jiwa telah mencapai 2900 orang, sementara aktivis HAM memperkirakan sekurangnya 3600 orang telah tewas. Negara-negara Eropa anggota Dewan Keamanan PBB yakni Inggris, Perancis, Jerman dan Portugal yang didukung oleh AS mengajukan rancangan resolusi untuk kembali melakukan intervensi demi menghentikan kekerasan di Suriah. Namun resolusi tersebut diveto Rusia dan China yang menganggap jatuhnya resolusi tidak akan membawa solusi bagi krisis Suriah secara damai.

Namun kegagalan resolusi DK PBB tidak akan menghentikan sanksi-sanksi yang akan diterapkan secara sepihak oleh negara-negara tertentu. Beberapa negara bertekad akan tetap menjatuhkan sanksi terhadap Suriah meski tanpa mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB. Banyak pihak melihat hal ini sebagai indikasi melemahnya otoritas DK PBB. Sementara itu Dewan HAM PBB yang terdiri dari koalisi para aktivis dan kelompok HAM mengirimkan rancangan resolusi kepada semua anggota PBB. Koalisi ini menyerukan pembentukan pemantau khusus PBB soal HAM di Suriah. Para pemimpin oposisi Suriah dijadwalkan pergi ke berbagai negara untuk mencari dukungan agar Dewan Nasional Suriah diakui sebagai perwakilan Suriah.

## Posisi Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki hubungan erat dengan negara-negara di Kawasan Timur Tengah, dimulai dari penyebaran agama Islam oleh keturunan Arab di Indonesia, dukungan terhadap kemerdekaan

Indonesia melawan penjajahan dan pengakuan secara *de facto* dan *de jure* dari negara-negara Arab di PBB. Hal tersebut memperlihatkan corak hubungan khusus antara Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah. Hubungan tersebut berjalan tidak saja berlandaskan hubungan formal diplomatik semata, namun diperkuat dengan solidaritas perjuangan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan nasional berdasarkan semangat persaudaraan kultural yang mendalam. Posisi ini menjadi prinsip yang secara teguh dijaga Indonesia dalam melaksanakan politik dan hubungan luar negeri dengan negara-negara sahabat di kawasan Timur Tengah hingga saat ini.

Indonesia juga memahami kultur khas masyarakat setempat yang pada dasarnya merupakan masyarakat *Durkeimian* yang struktur sosialnya lebih didasarkan atas ikatan paguyuban yang bersifat *less formal*, personal, dan parsial, serta senantiasa berpusat pada pemimpin *paternal*. Hal ini bertolak belakang dengan masyarakat demokratis menurut Peradaban Barat. Demokrasi secara fundamental dibentuk oleh konteks historis dan kultural dimana ia berasal, oleh sebab itu perlu kehati-hatian dalam membuat kebijakan mengenai model demokrasi yang sesuai untuk diterapkan di Timur Tengah.

Dalam menghadapi konflik politik era transisi demokrasi di Timur Tengah saat ini, Indonesia menerapkan pendekatan adaptif dengan perlakuan berbeda pada setiap kasus yang terjadi. Indonesia konsisten pada prinsip-prinsip Konstitusional dan penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial (nonintervensi). Dalam konteks ini Indonesia dapat menerima langkah masyarakat internasional yang sah dan dilakukan melalui kerangka multilateral, sepanjang hal tersebut berdasarkan pertimbangan humaniter dan tidak diiringi motif lain yang berpotensi mereduksi kedaulatan dan integrasi teritorial dari negara yang bersangkutan.

## Penutup

Indonesia perlu segera melakukan pemetaan serta mengkaji peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga dan meningkatkan hubungan dengan negara-negara yang mengalami demokratisasi di masa mendatang. Indonesia seyogyanya bersedia memberikan bantuan materil dan non materil kepada negara-negara Arab melalui proses demokratisasi secara adil dan damai.

Patut juga menjadi perhatian Pemerintah Indonesia adalah nasib para TKI di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia harus senantiasa siap untuk menghadapi kemungkinan pemulangan TKI dan warga negara Indonesia dari kawasan Timur Tengah yang tengah bergejolak.

## Rujukan:

1. "NATO: Serangan ke Libya Berlanjut", *Republika*, 7 Oktober 2011.
2. Ronny Prasetyo Yuliantoro, "Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Gejolak di Kawasan Timur Tengah: Pendekatan Adaptif dalam Bingkai Konsistensi Historis", dalam *Jurnal Diplomasi*, Vol.3 No.2, Juni 2011.
3. "Potret Buram 10 Tahun Invasi Afghanistan", *Republika*, 7 Oktober 2011.
4. "Palestina Didukung Jadi Anggota UNESCO", *Media Indonesia*, 7 Oktober 2011.
5. "Rusia dan China Gunakan Veto", *Kompas*, 6 Oktober 2011.
6. "Sanksi Tetap Dijatuhkan Tanpa Resolusi DK PBB", *Kompas*, 6 Oktober 2011.
7. "Yaman - Presiden Saleh Janji segera Mundur", *Kompas*, 10 Oktober 2011.
8. "Afghanistan – 10 Tahun Pertempuran Rakyat Terbelah", *Kompas*, 8 Oktober 2011.
9. "Militer AS Dinilai Gagal di Afghanistan", *Media Indonesia*, 8 Oktober 2011.
10. "PBB: Korban Tewas di Suriah 2.900 orang", *Republika*, 8 Oktober 2011.